

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN TANAH TERLANTAR

Oleh
Vincent Anderson Simanjuntak
NIM. 2205040103

ABSTRAK

Penetapan tanah terlantar merupakan bentuk kewenangan negara dalam melaksanakan fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum karena berpotensi mengurangi bahkan menghapus hak keperdataan pemegang sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak menjadi relatif karena dapat dibatalkan melalui mekanisme administratif apabila tanah dianggap tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap hak keperdataan pemegang sertifikat hak atas tanah dalam penetapan tanah terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak keperdataan pemegang sertifikat hak atas tanah serta menganalisis prosedur penetapan tanah terlantar dan penyelesaian hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, penelitian, dan pemberian peringatan sebelum penetapan tanah terlantar, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara maupun gugatan perdata sebagai sarana perlindungan hak keperdataan pemegang sertifikat hak atas tanah. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih terdapat kelemahan dalam pengaturan maupun penerapan penetapan tanah terlantar. Dengan demikian, diperlukan penguatan perlindungan hukum substantif agar penetapan tanah terlantar tetap sejalan dengan perlindungan hak keperdataan pemegang sertifikat hak atas tanah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Keperdataan, Tanah Terlantar, Sertifikat Hak Atas Tanah.

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF PROPRIETARY RIGHTS OF LAND TITLE CERTIFICATE HOLDERS IN THE DETERMINATION OF ABANDONED LAND

By
Vincent Anderson Simanjuntak
NIM. 2205040103

ABSTRACT

The determination of abandoned land is a form of state authority in implementing the social function of land as regulated under the Basic Agrarian Law. However, in practice, this policy often creates legal issues because it has the potential to reduce or even eliminate the proprietary rights of land title certificate holders. Land title certificates, which are intended to provide legal certainty and protection to rights holders, become relative in nature because they may be revoked through administrative mechanisms when the land is considered unused in accordance with the purpose of the granted rights. This condition raises legal issues regarding the protection of proprietary rights of land title certificate holders in the determination of abandoned land. This study aims to analyze the legal protection of proprietary rights of land title certificate holders and to examine the procedures for determining abandoned land. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal protection for land title certificate holders is provided through preventive and repressive legal protection. Preventive protection is carried out through stages of inventory, identification, research, and warning procedures before the determination of abandoned land, while repressive protection is carried out through dispute resolution mechanisms in the Administrative Court and civil lawsuits. However, such protection has not fully guaranteed legal certainty because there are still unclear indicators regarding abandoned land and the dominance of state administrative authority. Therefore, stronger substantive legal protection is needed to ensure that the determination of abandoned land remains consistent with the protection of proprietary rights of land title certificate holders.

Keywords: Legal Protection, Proprietary Rights, Abandoned Land, Land Title Certificate.